



## TARIK ULUR PEROMBAKAN KABINET

DEBORA SANUR L<sup>\*)</sup>

### Abstrak

*Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Politik Daniel Sparingga, telah menegaskan bahwa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden, Boediono, terus membahas dan mengevaluasi rencana perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan Presiden atas kinerja kabinet yang sekarang bila dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Bersatu I. Oleh sebab itu, Presiden SBY sejak memasuki pekan pertama Oktober 2011 sudah mulai mengkaji nama-nama calon menteri yang akan masuk dalam proses reshuffle kabinet bersama-sama dengan Wapres. Dalam proses perombakan kabinet ini Presiden mengandalkan hasil evaluasi dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto.*

### Pendahuluan

Staf Khusus Presiden bidang Politik, Daniel Sparingga, menegaskan pekan ini adalah pekan yang sangat krusial bagi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam tahapan baru mengenai *reshuffle* (perombakan) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Adapun dasar perombakan kabinet tersebut untuk mengakselerasi pertumbuhan kesejahteraan, memperkuat demokrasi, dan meningkatkan kesejahteraan. Ia memastikan akan adanya *reshuffle* kabinet, pada masa tiga tahun kepemimpinan Presiden SBY, yang jatuh pada 21 Oktober 2011. Menurutnya, Presiden telah mengatakan bahwa memasuki tahun ke-3 Pemerintahannya akan ada tim baru dan awak baru sebelum 20 Oktober, karena jatuh tempo tahun ketiga, adalah tanggal 21 oktober 2011. Saat ini Presiden

tengah menggodok nama-nama yang sepantasnya duduk di kabinet, dengan berbekal kemampuan yang mumpuni dan penyusun nama-nama tersebut dilakukan berdasarkan pedoman sosok yang paling lincah, paling gesit, dan paling cekatan. Oleh sebab itu, Daniel mengatakan bahwa saat ini Presiden SBY dan Wakil Presiden (Wapres) Boediono sudah mengantongi nama calon menteri dan mulai melakukan tahapan seleksi dengan membandingkan keunggulan masing-masing calon menteri. Presiden dan Wapres akan mulai membandingkan keunggulan masing-masing calon dan pada saat yang sama akan mensimulasikan untuk menghasilkan *team work* yang kuat. *Team work* penting karena menteri yang dipilih tidak hanya cocok tapi juga harus bisa menjadi kombinasi yang pas untuk seluruh kabinet.

<sup>\*)</sup> Calon Peneliti Bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: debora.sanur@dpr.go.id

## **Kepemerintahan Presiden SBY**

Menurut Jusuf Kalla saat dirinya menduduki jabatan sebagai Wapres dalam menghadapi perombakan kabinet, Presiden SBY menyarankan agar mempertimbangkan faktor kinerja. Faktor kinerja tersebut, kata dia, akan dinilai oleh Presiden SBY dengan meminta masukan dari wakil Presiden. Jadi, menteri diganti dengan pertimbangan kinerja, meskipun ada juga yang dengan pertimbangan politis. Sedangkan untuk saat ini, sudah banyak pihak yang menilai, termasuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Anggota DPR dari Jawa Barat, Deding Ishak beranggapan bahwa tantangan KIB Jilid II ini akan jauh lebih berat dibanding periode yang lalu. Selain ditantang mengatasi persoalan korupsi yang sudah begitu menggejala di Tanah Air ini, pemerintah juga ditantang untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, serta masalah politik dan ekonomi yang belum stabil. Oleh sebab itu, bila pada periode ini para menteri masih belum dapat berkinerja sesuai dengan keinginan rakyat, dan belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, maka *reshuffle* akan menjadi kurang berarti.

Pengamat politik Netral Institute Djoko Waluyo menilai semua Presiden RI memiliki nilai jual atau kepahlawanan masing-masing. Soekarno dikenal sebagai bapak proklamator, Soeharto dikenal sebagai bapak pembangunan, BJ Habibie sebagai bapak teknologi, Ibu Megawati sebagai ibu demokrasi, dan Gus Dur sebagai bapak pembauran. Sedangkan Presiden SBY sampai saat ini menurutnya masih belum memiliki "nilai jual" yang pas. Sebagai bapak antikorupsi namun perangnya melawan korupsi pun masih belum maksimal. Sedangkan bila beliau ingin dikenal sebagai bapak pendidikan, penyelesaian terhadap masalah pendidikan juga belum tampak. Oleh sebab itu, Presiden SBY seharusnya berani memunculkan satu sasaran dan fokus kinerja dalam masa pemerintahannya.

Ia mencontohkan, jika SBY ingin dikenal sebagai bapak antikorupsi, saat ini belum terlambat jika memfokuskan pada pembersihan koruptor di semua departemen.

## **Permasalahan Menteri KIB Jilid II**

Menurut Guru Besar Psikologi Islam Universitas Negeri Syarif Hidayatullah dari hasil evaluasi UKP4, setidaknya dua sektor perlu dibenahi, yakni hukum dan politik. Oleh sebab itu, ada beberapa nama Menteri yang banyak dibicarakan di media berkaitan dengan isu *reshuffle* ini. Perbincangan mengenai perkiraan media bahwa mereka akan diganti memiliki sejumlah alasan. Alasan-alasan tersebut di antaranya adalah:

- A. Kinerjanya dianggap tidak memenuhi target
  1. Menteri Pekerjaan Umum: Djoko Kirmanto  
Desakan: Indo Barometer menilai pencapaian target infrastruktur belum maksimal.
  2. Menteri Hukum dan HAM: Patrialis Akbar  
Desakan: Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai Menteri Patrialis Akbar belum berhasil menangani masalah di lembaga pelayan masyarakat. Selain itu, ia sering mengeluarkan pernyataan kontroversial.
  3. Menteri Energi dan SDM: Darwin Zahedy Saleh  
Desakan: pengamat energi Pri Agung Rakhmanto menilai Menteri Darwin layak diganti, karena selama dua tahun ini, kebijakan energi di Indonesia dinilai tak jelas.
  4. Menteri Keuangan: Agus Martowardojo  
Desakan: Sekretariat Jenderal PPP M. Romahurmuziy menilai kinerja sektor perekonomian kurang optimal, "portofolio di sektor perekonomian belum optimal".

- B. Tersangkut dugaan korupsi
1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Muhaimin Iskandar  
Desakan: kinerja kementerian dinilai miring karena masalah tenaga kerja, khususnya TKI. Ditambah kasus dugaan korupsi di kementeriannya. Kata Qodari, “layak diganti. Tapi sulit diprediksi karena posisinya sebagai ketua umum PKB.”
  2. Menteri Pemuda dan Olahraga: Andi Mallarangeng  
Desakan: Peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Adjie Alfaraby, mengatakan, kasus dugaan korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bisa menjadi gambaran menteri itu layak dievaluasi.
- C. Alasan sakit dan persoalan pribadi
1. Menteri Badan Usaha Milik Negara: Mustafa Abubakar  
Desakan: Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, Menteri Mustafa layak diganti karena sakit.
  2. Menteri Perumahan Rakyat: Su-harso Monoarfa  
Desakan: menurut Wakil Ketua Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Niam “Presiden harus mengganti menteri yang tidak melindungi anak dan keluarga”.
  3. Menteri Perhubungan: Freddy Numberi  
Desakan: Hasil survei LSI menyebutkan, masalah pribadi yang menerpa Menteri Freddy Numberi mengakibatkan kepuasan publik terhadap pemerintah menurun.

Selain itu ada juga tuntutan yang datang dari masyarakat seperti munculnya gerakan anti Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu. Gerakan anti Mendag ini berasal dari mahasiswa dan petani. Koalisi bersama Forum Anti korupsi dan *Indag Watch*, menuntut Mendag mundur karena Mendag gagal

menghadang barang asing ke Indonesia. Menurut Koordinator Koalisi Bersama Forum Anti Korupsi dan *Indag Watch*, Muslim Arbi, Mari Elka Pangestu harus mundur karena di bawah Menteri Mari Elka Pangestu, Kementerian Perdagangan semakin loyo. Menteri Mari seolah membuka lebar-lebar masuknya garam impor, ikan, beras, jagung, bawang merah, cabe, jeruk, kentang, lengkung, durian dan bahkan singkong. Sedangkan, pengrajin rotan di wilayah Cirebon, Jawa Barat seperti yang terjadi di Plered, Sumber dan Plumbon, malah menjadi hancur. Usaha mereka hancur karena bahan baku rotan dibuka kran ekspornya, dampaknya ribuan orang menggangur karena kebijakan ekspor bahan bakar tersebut.

## Perombakan Kabinet KIB Jilid II

Presiden pernah mengatakan akan merubah gaya kepemimpinannya. Gaya baru yang dimaksudkan itu adalah mengedepankan keberhasilan program ketimbang akomodasi politik, saat ini ada 19 dari 34 menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II yang berasal dari partai politik. Menurut Indria Samego, pengamat politik dari LIPI, perombakan kabinet bukan solusi untuk mendapatkan pemerintahan yang lebih baik. Menurut dia, hal yang penting untuk dibenahi adalah kepemimpinan Presiden agar tidak terlalu tersandera oleh persoalan politik. Anggota dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarak, mengungkapkan bahwa Presiden bakal mengurangi porsi partai politik dalam *reshuffle* kabinet hingga nantinya akan lebih banyak kalangan profesional dibanding partai politik. Namun, Nasir Djamil, salah satu ketua Partai PKS, tidak yakin jika Presiden akan mengurangi jatah menteri dari partai anggota koalisi, karena itu berarti Presiden akan melanggar kesepakatan koalisi. Padahal, kesepakatan itu adalah harga mati kontrak antara Presiden dengan partai koalisi.

Pengamat politik J. Kristiadi, peneliti senior *Center for Strategic and International Studies*, mengatakan *reshuffle* akan dinilai percuma tanpa

sikap tegas Presiden untuk melakukan reformasi politik dan hukum, apalagi bila hanya ditujukan untuk pencitraan semata. Menurutnya, reformasi politik yang harus dilakukan Presiden mencakup pemberantasan korupsi, mafia peradilan, dan politik keuangan yang lekat dengan mafia anggaran. Sehingga yang terpenting bukan soal merombak kabinet, melainkan kembali berfokus pada hal yang menjadi tujuan. Di sekretariat gabungan, kekuatan politik koalisi mencapai 74% karena saat pemilu, mendapat dukungan 64%, namun selama paradigma politik masih berkuat pada politik bagi-bagi kekuasaan. Kristiadi menegaskan para politikus hanya akan jadi power seeker.

## Penutup

*Reshuffle* atau perombakan kabinet ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja kabinet. Oleh sebab itu, bila Presiden akan melakukan *reshuffle* sebaiknya presiden memperhatikan hal-hal yang menjadi fokus kerjanya. Contohnya, seperti yang dituntutkan oleh masyarakat selama ini mengenai persoalan hukum, bila Presiden memang peduli pada persoalan penegakan hukum, maka ia tidak boleh setengah-setengah.

Menteryangdirekrutpunseharusnya adalah menteri yang memiliki kemampuan di bidang yang ia kerjakan, bukan hanya berdasarkan kepentingan koalisi politik semata. Karena bila tidak, maka hal tersebut tidak hanya akan merugikan SBY sendiri sebagai kepala negara, tetapi juga akan merugikan rakyat. Jadi, Presiden sebaiknya harus berhati-hati dalam memilih para menteri barunya yaitu sosok yang mengerti tentang masalah integritas dan juga harus memiliki kapabilitas.

Apabila (isu) *reshuffle* selalu digelindingkan setiap tahun, maka sesungguhnya hal tersebut memberikan indikasi adanya ketidakstabilan politik khususnya internal Kabinet yang dipimpin Presiden. Kondisi tersebut memberikan dampak kurang baik kepada semua sektor termasuk para menteri dan kementeriannya itu sendiri.

## Rujukan:

1. “Petani dan Mahasiswa Tuntut Mundur Mendag”, <http://www.tribunnews.com/2011/10/03/petani-dan-mahasiswa-tuntut-mundur-mendag>, diakses tanggal 5 Oktober 2011.
2. “Presiden Bidik Calon Menteri yang Gesit dan Cekatan”, <http://www.tribunnews.com/2011/10/03/Presiden-bidik-calon-menteri-yang-gesit-dan-cekatan>, diakses tanggal 5 Oktober 2011.
3. “*Reshuffle* Kabinet SBY Harus Belajar dari Sejarah”, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=288064>, diakses tanggal 5 Oktober 2011.
4. “SBY-Boediono Mulai Seleksi Calon Menteri”, <http://www.tribunnews.com/2011/10/03/sby-boediono-mulai-seleksi-calon-menteri>, diakses tanggal 5 Oktober 2011.
5. “Perombakan Kabinet Presiden Kurangi Porsi Partai”, *Koran Tempo*, 25 September 2011, hal. 1.
6. “Efektivitas *Reshuffle* Diragukan”, *Koran Tempo*, 25 September 2011, hal. 2.
7. “Utak-Atik *Reshuffle* Kabinet”, *Koran Tempo*, 25 September 2011, hal. 3.